

**LAPORAN PENILAIAN RISIKO TAHUN 2026
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET**

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kode Pos 62291
Telp. 0322-322231 e-mail : kec.deket@lamongankab.go.id
website : www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penilaian Risiko Tahun 2026 Kantor Kecamatan Deket.

Penerapan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mensyaratkan terbangunnya infrastruktur disetiap unsurnya, salah satu unsur yang harus dibangun adalah daftar risiko (risk register) ditingkat entitas dan kegiatan sebagai penyempurnaan pengendalian yang masih lemah.

Laporan Penilaian Risiko Tahun 2026 ini sebagai persyaratan yang sangat penting bagi peningkatan mutu dan pelaksanaan kinerja Kantor Kecamatan Deket. Harapannya, laporan ini bisa menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja seluruh pegawai Kantor Kecamatan Deket.

Akhir kata semoga buku laporan penilaian risiko Tahun 2026 ini bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Kecamatan Deket.



SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M
Pembina
NIP. 19851010 200602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah organisasi mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi misinya. Dalam pencapaian tujuan organisasi terdapat banyak kemungkinan yang terjadi yang dapat mengakibatkan tujuan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, organisasi pemerintah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan di dalam sasaran strategis yang harus dicapai. Dalam merealisasikan sasaran strategis untuk mencapai target kinerja utama yang sudah ditetapkan tersebut ada kemungkinan gagal atau tidak dapat dicapai sesuai rencana. Hal ini disebabkan adanya potensi risiko yang terjadi, sehingga perlu penerapan manajemen risiko untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dan berdampak pada sasaran strategis yang ingin dicapai.

Implementasi penilaian risiko pada Kantor Kecamatan Deket dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di Kantor Kecamatan Deket pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Deket jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, upaya implementasi manajemen risiko di lingkungan Kantor Kecamatan Deket perlu dikembangkan lebih lanjut.

B. Maksud dan Tujuan

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya.

Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit PemilikTingkat Eselon IV dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Memberikan gambaran profil risiko;
- c. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- d. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- e. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- f. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- g. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- h. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

C. Ruang Lingkup

Kegiatan penilaian risiko pada Kecamatan Deket dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;

- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

Ruang lingkup penilaian risiko adalah penilaian risiko tribulan IV, Juli – September, atas peran Kantor Kecamatan Deket sebagai unsur penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Lamongan. Penilaian risiko (*risk assessment*) difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Deket

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Lingkungan pengendali adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan system pengendalian intern yaitu :

1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pedelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

Sumber Daya Manusia.

7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern yang

dijadikan indikator pencapaian tujuan tersebut di atas yaitu:

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian)
2. Risk Assessment (Penilaian Resiko)
3. Control Activities (Kegiatan Pengendalian)
4. Information & Communication (Informasi dan Komunikasi)
5. Monitoring (Pemantauan)

BAB IV

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks / Tujuan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Deket berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), termasuk pada target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif.

Pada RPJMD Kabupaten Lamongan memiliki tujuan “**menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi**”. Dengan berpedoman pada tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan tersebut maka tujuan Kecamatan Deket antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan publik;
2. Meningkatkan kemandirian desa.

Dengan indikator tujuan antara lain :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Jumlah desa mandiri.

Penetapan konteks dilakukan meliputi penentuan unit pemilik resiko, sasaran yang akan dikelola resikonya, horizon waktu resiko yang akan dikelola dan penerapan kriteria untuk menganalisa resiko dan evaluasi resiko. Adapun sasaran yang dikelola risikonya sesuai dengan rencana strategis 2021 - 2026 meliputi :

1. Meningkatkan manajemen internal Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Deket ;
3. Meningkatkan pemberdayaan desa dan masyarakat.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan dengan cara mengkaji dan mendata kemungkinan- kemungkinan atau kejadian- kejadian yang berpotensi menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan pelaksanaan setiap kegiatan utama.

Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Kecamatan Deket

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan											
Nama OPD	Kecamatan Deket											
Tahun Penilaian	2026											
Periode yang Dinilai	2026											
Tujuan Strategis												
Sasaran strategis OPD												
Urusan Pemerintahan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan masyarakat dan desa, Kepegawaian dan Pengembangan SDM											
OPD yang Dinilai	Kecamatan Deket											
			Risiko					Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Uraian	Skenario Risiko	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	j
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Pelaksanaan	Terjadinya manipulasi data atau pungutan tidak resmi dalam pelayanan kepada masyarakat.	Petugas pelayanan memanipulasi data atau meminta pungutan tidak resmi kepada masyarakat saat memberikan layanan.	RSO.24.99.40.01	Kecamatan Deket	Pengawasan internal belum optimal Lemahnya penerapan sanksi Integritas pegawai belum merata Sistem pengendalian internal kurang kuat	Internal	UC	Kerugian bagi masyarakat dan institusi Menurunnya kepercayaan publik Timbulnya permasalahan hukum Reputasi kecamatan menjadi buruk	Masyarakat, petugas kecamatan, pemerintah daerah.
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Pelaksanaan	Laporan koordinasi menyebutkan kegiatan telah dilaksanakan, padahal rapat hanya dilakukan secara informal tanpa undangan resmi, daftar hadir, dan dokumentasi.	Petugas melaporkan kegiatan koordinasi secara fiktif tanpa bukti resmi pelaksanaan.	RSO.24.99.40.02	Kecamatan Deket	"Verifikasi kegiatan dan dokumentasi kurang memadai. Pengawasan internal belum optimal."	Internal	UC	Laporan kinerja tidak akurat.	Kecamatan, Pemerintah Desa, Pendamping Desa, Masyarakat
3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	Pelaksanaan	Ketidaksesuaian data jumlah keluarga peserta dengan kondisi riil di lapangan.	Warga tidak hadir karena minimnya informasi dan motivasi.	RSO.24.99.40.03	Kecamatan Deket	Pendataan tidak diverifikasi secara memadai.	Internal	UC	Laporan kegiatan tidak akurat. Menurunnya kepercayaan	Warga, kader PKK, kecamatan.

	Kecamatan dan Kelurahan							Pengawasan pelaksanaan kegiatan masih lemah.			terhadap program.	
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	Pelaksanaan	Ketidaksesuaian data laporan konflik yang ditangani dengan kondisi riil di lapangan.	Petugas melaporkan jumlah keluarga peserta tidak sesuai kondisi riil di lapangan.	RSO.24.99.40.04	Kecamatan Deket	Validasi laporan belum dilakukan secara menyeluruh. Pengawasan internal terhadap pelaporan masih lemah.	Internal	UC	"Laporan kinerja tidak akurat. Menurunnya kepercayaan masyarakat."	Masyarakat, Kecamatan, Polsek, Satpol PP, Pemerintah Daerah
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	terlaksana	Pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tidak sesuai dengan pelaksanaan riil.	Petugas menyajikan laporan urusan pemerintahan umum yang tidak mencerminkan kegiatan sebenarnya.	RSO.24.99.40.05	Kecamatan Deket	"Pengawasan internal belum optimal. Verifikasi laporan belum dilakukan secara memadai."	Internal	C	"Laporan kinerja tidak akurat. Menurunnya kepercayaan pimpinan dan publik."	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Aparatur Pelaksana.
6	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi	Pelaksanaan	Dalam laporan disebutkan bahwa seluruh desa telah dilakukan pembinaan dan diberikan rekomendasi perbaikan, namun sebagian desa tidak memiliki bukti rekomendasi tertulis maupun dokumentasi kegiatan.	Laporan menyatakan seluruh desa telah dibina dan diberikan rekomendasi, namun sebagian kegiatan tidak disertai bukti tertulis maupun dokumentasi pendukung.	RSO.24.99.40.06	Kecamatan Deket	Pengawasan internal terhadap penyusunan laporan masih lemah.	Internal	UC	Menurunnya tingkat kepercayaan pimpinan dan pemangku kepentingan.	Desa, Kecamatan, dan masyarakat penerima manfaat.
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Pelaksanaan	Usulan Anggaran yang Tidak sesuai denganKebutuhan Anggaran	PPK/PPTK melakukan permintaan usulan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan	RSO.24.99.40.07	Kecamatan Deket	Kurangnya integritas pegawai	Internal	C	Jadwal penyusunan dokumen terganggu, kualitas dokumen menurun, dan potensi revisi anggaran meningkat.	OPD, TAPD
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Pelaksanaan	Dalam laporan pertanggungjawaban, tercantum pengeluaran perjalanan dinas penuh, namun sebagian kegiatan tidak dilaksanakan sesuai rencana dan	Laporan pertanggungjawaban mencatat biaya perjalanan dinas secara penuh, padahal pelaksanaannya tidak seluruhnya sesuai rencana dan	RSO.24.99.40.08	Kecamatan Deket	Pengawasan internal terhadap dokumen keuangan lemah. Verifikasi bukti transaksi	Internal	C	Terjadinya potensi kerugian keuangan daerah. Munculnya temuan pemeriksaan dari APIP	Pimpinan perangkat daerah, bagian keuangan, pemerintah daerah.

				bukti pendukung tidak lengkap.	bukti pendukungnya tidak lengkap.			tidak dilakukan secara berlapis.				
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	terlaksana	Terdapat data kehadiran atau riwayat jabatan pegawai yang tidak sesuai kondisi riil, namun tetap digunakan sebagai dasar pengajuan hak kepegawaian.	Data kehadiran atau riwayat jabatan pegawai tidak sesuai kondisi sebenarnya, namun tetap dijadikan dasar pengajuan hak kepegawaian.	RSO.24.99.40.09	Kecamatan Deket	"Pengawasan internal terhadap data kepegawaian belum optimal. Verifikasi data kepegawaian tidak dilakukan secara berlapis. Pemisahan tugas pengelola data dan pemeriksa belum jelas."	Internal	UC	"Terjadinya pemberian hak kepegawaian yang tidak sesuai ketentuan. Berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan. Menurunnya kepercayaan terhadap pengelolaan kepegawaian."	ASN di perangkat daerah
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pelaksanaan	Terdapat data kehadiran atau riwayat jabatan pegawai yang tidak sesuai kondisi riil, namun tetap digunakan sebagai dasar pengajuan hak kepegawaian.	Data kehadiran atau riwayat jabatan pegawai tidak sesuai kondisi sebenarnya, namun tetap dijadikan dasar pengajuan hak kepegawaian.	RSO.24.99.40.010	Kecamatan Deket	"Pengawasan internal terhadap data kepegawaian belum optimal. Verifikasi data kepegawaian tidak dilakukan secara berlapis. Pemisahan tugas pengelola data dan pemeriksa belum jelas."	Internal	UC	"Terjadinya pemberian hak kepegawaian yang tidak sesuai ketentuan. Berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan. Menurunnya kepercayaan terhadap pengelolaan kepegawaian."	ASN di perangkat daerah
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pelaksanaan	Barang yang diterima secara fisik tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, namun tetap dibuatkan berita acara serah terima.	Pejabat penerima barang menyetujui dan menandatangani berita acara serah terima meskipun barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi kontrak.	RSO.24.99.40.011	Kecamatan Deket	Pengawasan dan pemeriksaan barang kurang ketat.	Internal	UC	Menurunnya kepercayaan terhadap proses pengadaan.	OPD pengguna barang, masyarakat penerima layanan.

12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Pelaksanaan	Pembayaran jasa pemeliharaan dilakukan secara penuh meskipun pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai jadwal dan bukti pelaksanaan tidak lengkap.	Pejabat pembuat komitmen atau petugas pembayaran melakukan pembayaran jasa pemeliharaan secara penuh, meskipun pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai jadwal dan bukti pelaksanaan tidak lengkap.	RSO.24.99.40.012	Kecamatan Deket	Pemisahan tugas antara pengawas pekerjaan dan pejabat pembayaran belum optimal.	Internal	UC	Menurunnya akuntabilitas pengelolaan jasa penunjang.	OPD pengguna jasa dan masyarakat.
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pelaksanaan	Dalam laporan dicantumkan 5 unit gedung telah direhabilitasi, namun setelah dilakukan pengecekan, terdapat 1 unit yang hanya dilakukan perbaikan ringan tanpa dokumentasi memadai.	Petugas penyusun laporan mencantumkan 5 unit gedung telah direhabilitasi, padahal 1 unit hanya diperbaiki ringan tanpa dokumentasi memadai.	RSO.24.99.40.013	Kecamatan Deket	"Verifikasi hasil pekerjaan belum dilakukan secara menyeluruh. Dokumentasi fisik dan administrasi belum distandarkan."	Internal	UC		Pemerintah daerah, pegawai, dan masyarakat pengguna layanan.

Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Kecamatan Deket

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Nama OPD		Kecamatan Deket								
Tahun Penilaian		2026								
Periode yang Dinilai		2026								
Tujuan Strategis		Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak Yang Berorientasi Layanan								
Urusan Pemerintahan		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan masyarakat dan desa, Kepegawaian dan Pengembangan SDM								
OPD yang dinilai		Kecamatan Deket								
Tujuan Strategis Pemerintah		Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak Yang Berorientasi Layanan								
Sasaran		Meningkatnya profesional APIP Meningkatkan Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah								
No	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Nilai Sinergitas (Nilai)	Terjadinya manipulasi data atau pungutan tidak resmi dalam pelayanan kepada masyarakat.	Petugas pelayanan memanipulasi data atau meminta pungutan tidak resmi kepada masyarakat saat memberikan layanan.	RSO.24.99.40.01	Kecamatan Deket	"Pengawasan internal belum optimal Lemahnya penerapan sanksi Integritas pegawai belum merata Sistem pengendalian internal kurang kuat"	Internal	UC	Penyusunan rencana pemberdayaan desa tertunda.	Kecamatan, Pemerintah Desa, Pendamping Desa, Masyarakat
2	Nilai Sinergitas (Nilai)	Laporan koordinasi menyebutkan kegiatan telah dilaksanakan, padahal rapat hanya dilakukan secara informal tanpa undangan resmi, daftar hadir, dan dokumentasi.	Petugas melaporkan kegiatan koordinasi secara fiktif tanpa bukti resmi pelaksanaan.	RSO.24.99.40.02	Kecamatan Deket	Verifikasi kegiatan dan dokumentasi kurang memadai. Pengawasan internal belum optimal.	Internal	UC	Laporan kinerja tidak akurat.	Kecamatan, Pemerintah Desa, Pendamping Desa, Masyarakat
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	Usulan Anggaran yang Tidak sesuai denganKebutuhan Anggaran	PPK/PPTK melakukan permintaan usulan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan	RSO.24.99.40.04	Kecamatan Deket	Kurangnya integritas pegawai	Internal	UC	Merugikan Daerah	Pemerintah Daerah

4	Nilai Manajemen Risiko (Nilai)	Dalam laporan pertanggungjawaban, tercantum pengeluaran perjalanan dinas penuh, namun sebagian kegiatan tidak dilaksanakan sesuai rencana dan bukti pendukung tidak lengkap.	Laporan pertanggungjawaban mencatat biaya perjalanan dinas secara penuh, padahal pelaksanaannya tidak seluruhnya sesuai rencana dan bukti pendukungnya tidak lengkap.	RSO.24.99.40.04	Kecamatan Deket	Pengawasan internal terhadap dokumen keuangan lemah. Verifikasi bukti transaksi tidak dilakukan secara berlapis.	Internal	UC	"Terjadinya potensi kerugian keuangan daerah. Munculnya temuan pemeriksaan dari APIP atau BPK."	Pimpinan perangkat daerah, bagian keuangan, pemerintah daerah.
5	Nilai Manajemen Risiko (Nilai)	Dalam laporan pertanggungjawaban, tercantum pengeluaran perjalanan dinas penuh, namun sebagian kegiatan tidak dilaksanakan sesuai rencana dan bukti pendukung tidak lengkap.	Laporan pertanggungjawaban mencatat biaya perjalanan dinas secara penuh, padahal pelaksanaannya tidak seluruhnya sesuai rencana dan bukti pendukungnya tidak lengkap.	RSO.24.99.40.05	Kecamatan Deket	Pengawasan internal terhadap dokumen keuangan lemah. Verifikasi bukti transaksi tidak dilakukan secara berlapis.	Internal	UC	Terjadinya potensi kerugian keuangan daerah. Munculnya temuan pemeriksaan dari APIP atau BPK.	Pimpinan perangkat daerah, bagian keuangan, pemerintah daerah.
6	Nilai Manajemen Risiko (Nilai)	Terdapat data kehadiran atau riwayat jabatan pegawai yang tidak sesuai kondisi riil, namun tetap digunakan sebagai dasar pengajuan hak kepegawaian.	Data kehadiran atau riwayat jabatan pegawai tidak sesuai kondisi sebenarnya, namun tetap dijadikan dasar pengajuan hak kepegawaian.	RSO.24.99.40.06	Kecamatan Deket	Pengawasan internal terhadap data kepegawaian belum optimal. Verifikasi data kepegawaian tidak dilakukan secara berlapis. Pemisahan tugas pengelola data dan pemeriksa belum jelas.	Internal	UC	Terjadinya pemberian hak kepegawaian yang tidak sesuai ketentuan. Berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan. Menurunnya kepercayaan terhadap pengelolaan kepegawaian.	ASN di perangkat daerah

C. Hasil Analisis Risiko

Analisis risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat kemungkinan suatu risiko dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang sudah diidentifikasi serta Rencana tindak pengendalian resiko (RTP) sebagaimana tabel berikut ini :

Resiko Strategis Kantor Kecamatan Deket

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Sisa Resiko
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
Resiko Strategis OPD										
1	Penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	Pelayanan E-KTP, KK, dan dokumen lainnya terlambat dan belum sesuai dengan SPM	RSO .24.99.62.01	CAMAT	Server, jaringan IT local/nasional terbatas Listrik padam sewaktu-waktu Masa usia peralatan yang sudah tua.	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses pelayanan masyarakat Berkurangnya kepuasan masyarakat Mesin cetak E-KTP sering macet/rusak	Masyarakat	Nilai IKM tidak maksimal

2	Desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat	Masyarakat dan kepemudaan kurang berkembang	RSO.24.99.62.02	CAMAT	Minimnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kepemudaan	Internal dan Eksternal	C	Desa Mandiri sulit dibentuk	Desa/ Masyarakat dan Kecamatan Deket	Indeks Desa Membangun tidak mengalami kenaikan
3	Desa naik kelas	Terlambatnya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan data-data yang diperlukan	RSO.24.99.62.03	CAMAT	Masih kurang tertibnya perangkat desa membuat laporan	Internal	C	Desa Mandiri sulit dibentuk	Kecamatan Deket	Indeks Desa Membangun tidak mengalami kenaikan
4	Konflik yang tertangani	Keamanan lingkungan kurang	RSO.24.99.62.04	CAMAT	Jumlah SDM linmas kurang memadai dan besaran insentifnya masih rendah	Internal dan Eksternal	C	Desa akan kesulitan dalam antisipasi dan penanganan jika terjadi konflik sosial	Masyarakat dan Kecamatan Deket	Konflik yang tertangani kurang maksimal

Risiko Operasional Kantor Kecamatan Deket

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		Sisa Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	terlaksana	"Resiko Operasional : Terjadinya keterlambatan dalam proses koordinasi antara kecamatan, desa, dan lembaga pendukung"	RSO.24.99.40.02	Kecamatan Deket	Respons lambat akibat beban kerja tinggi dan kurangnya prioritas.	INTERNAL	UC	Penyusunan rencana pemberdayaan desa tertunda.	Kecamatan, Pemerintah Desa, Pendamping Desa, Masyarakat	
2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	terlaksana	"Resiko Operasional : Partisipasi warga rendah dalam kegiatan PKK."	RSO.24.99.40.03	Kecamatan Deket	Sosialisasi kegiatan tidak efektif.	INTERNAL	UC	Kurangnya media komunikasi terstruktur.	Kegiatan tidak optimal dan target tidak tercapai.	
3	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	terlaksana	"Resiko Operasional : Keterlambatan penyampaian informasi dan koordinasi antar-instansi menyebabkan respons lambat terhadap gangguan ketertiban umum."	RSO.24.99.40.04	Kecamatan Deket	"Mekanisme pelaporan manual Minimnya sarana komunikasi terpadu Tidak adanya jadwal koordinasi yang baku Keterbatasan kehadiran pada rapat koordinasi"	INTERNAL	UC	"Gangguan ketertiban tidak tertangani cepat Potensi konflik meningkat Penilaian negatif dari masyarakat terkait kualitas pelayanan publik"	Masyarakat, Kecamatan, Polsek, Satpol PP, Pemerintah Daerah	

4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	terlaksana	"Resiko Operasional : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tidak sepenuhnya sesuai dengan penugasan Kepala Daerah."	RSO.24 .99.40.0 5	Kecamatan Deket	"Keterbatasan jumlah aparat kecamatan yang menangani pembinaan desa. Jadwal pembinaan belum tersusun secara rinci dan terukur. Prioritas kegiatan lain menyebabkan pembinaan desa tertunda."	INTERNAL	UC	"Tidak seluruh desa memperoleh pembinaan dan rekomendasi yang dibutuhkan. Kesalahan administrasi pemerintahan desa berpotensi berulang. Capaian kinerja kegiatan pembinaan dan pengawasan tidak optimal."	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Aparatur Pelaksana.
5	"Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa"	Jumlah Dokumen yang difasilitasi	terlaksana	"Resiko Operasional : Kecamatan merencanakan pembinaan dan pengawasan ke seluruh desa terkait administrasi pemerintahan desa. Namun dalam pelaksanaannya, hanya sebagian desa yang difasilitasi karena keterbatasan waktu dan	RSO.24 .99.40.0 6	Kecamatan Deket	Beban kerja tinggi, kurangnya monitoring dokumen masuk-keluar, dan lemahnya sistem pengingat.	INTERNAL	UC	Penundaan layanan pemerintahan desa, potensi ketidaksesuaian regulasi, dan gangguan jadwal pembangunan desa.	Desa, Kecamatan, dan masyarakat penerima manfaat.

				jumlah aparatur."								
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	terlaksana	"Resiko Operasional : Keterlambatan penyusunan RKPD dan RENJA perangkat daerah."	RSO.24 .99.40.07	Kasubag Perencanaan, evaluasi dan keuangan	Kurangnya koordinasi dan ketidaklengkapan data pendukung dari unit kerja.	INTERNAL	UC	Jadwal penyusunan dokumen terganggu, kualitas dokumen menurun, dan potensi revisi anggaran meningkat.	OPD, TAPD	
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	terlaksana	"Resiko Operasional : Terlambatnya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/tahunan."	RSO.24 .99.40.08	Kecamatan Deket	Beban kerja tinggi, keterlambatan penyampaian bukti belanja dari bidang/unit lain.	INTERNAL	UC	Keterlambatan pelaporan menyebabkan tidak terpenuhinya tenggat waktu regulasi dan berpotensi menimbulkan teguran/penilaian kinerja buruk.	Pimpinan perangkat daerah, bagian keuangan, pemerintah daerah.	
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	terlaksana	"Resiko Operasional : Pengajuan kenaikan pangkat beberapa pegawai terlambat diproses karena data kepegawaian tidak diperbarui secara berkala dan dokumen pendukung belum lengkap."	RSO.24 .99.40.09	Kecamatan Deket	"Pengelolaan data kepegawaian masih dilakukan secara manual atau belum terintegrasi. Beban kerja petugas kepegawaian tinggi Kurangnya pengecekan	INTERNAL	UC	"Hak pegawai (kenaikan pangkat/gaji berkala) tertunda. Keluhan pegawai meningkat. Kinerja dan motivasi pegawai menurun."	ASN di perangkat daerah	

							kelengkapan berkas sejak awal."					
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	terlaksana	"Resiko Operasional : Surat masuk dan keluar tidak tercatat secara lengkap dalam buku agenda atau aplikasi, sehingga beberapa surat tindak lanjut terlambat diproses."	RSO.24 .99.40.0 10	Kecamatan Deket	"Sistem administrasi persuratan masih dilakukan secara manual. Keterbatasan sumber daya petugas administrasi."	INTERNAL	UC	"Keterlambatan tindak lanjut surat dan kegiatan. Risiko kehilangan dokumen penting."	"Masyarakat Perangkat daerah lain Pimpinan instansi"	
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	terlaksana	"Resiko Operasional : Pengadaan peralatan kantor yang direncanakan untuk menunjang pelayanan tidak dapat digunakan optimal karena spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja."	RSO.24 .99.40.0 11	Kecamatan Deket	"Perencanaan kebutuhan barang tidak dilakukan secara detail. Penyusunan spesifikasi teknis kurang tepat."	INTERNAL	UC	"Barang tidak dimanfaatkan secara optimal. Pelaksanaan tugas dan pelayanan terganggu."	OPD pengguna barang, masyarakat penerima layanan.	

12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	terlaksana	"Resiko Operasional : Jasa kebersihan yang disediakan tidak mencakup seluruh area kantor sehingga kebersihan lingkungan kerja tidak terjaga secara optimal."	RSO.24 .99.40.0 12	Kecamatan Deket	Pengawasan pelaksanaan jasa kurang optimal.	INTERNAL	UC	Lingkungan kerja menjadi kurang nyaman.	OPD pengguna jasa dan masyarakat.
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	terlaksana	"Resiko Operasional : Kerusakan aset daerah karena pemeliharaan tidak terlaksana tepat waktu atau tidak sesuai standar."	RSO.24 .99.40.0 13	Kecamatan Deket	Jadwal pemeliharaan tidak dipatuhi, kurangnya pengawasan, dan minimnya anggaran.	INTERNAL	UC	Menurunnya kualitas pelayanan, meningkatnya biaya perbaikan, dan gangguan operasional.	Pemerintah daerah, pegawai, dan masyarakat pengguna layanan.
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	terlaksana	"Resiko Operasional : Kerusakan aset daerah karena pemeliharaan tidak terlaksana tepat waktu atau tidak sesuai standar."	RSO.24 .99.40.0 14	Kecamatan Deket	Jadwal pemeliharaan tidak dipatuhi, kurangnya pengawasan, dan minimnya anggaran.	INTERNAL	UC	Menurunnya kualitas pelayanan, meningkatnya biaya perbaikan, dan gangguan operasional.	Pemerintah daerah, pegawai, dan masyarakat pengguna layanan.

D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan

Hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Kecamatan Deket sebagai langkah strategis dan bahan dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP. Adapun tabel kegiatan yang telah di laksanakan sebagaimana tabel berikut :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:							
1	Terjadinya manipulasi data atau pungutan tidak resmi dalam pelayanan kepada masyarakat.	RSO.24.99.40.01	Tersedianya SOP pelayanan, informasi persyaratan dan biaya layanan, serta pengawasan oleh atasan langsung.	Pengawasan pelayanan belum dilakukan secara rutin dan belum seluruh proses pelayanan terdokumentasi dengan baik.	Melakukan sosialisasi pelayanan kepada petugas, memasang informasi biaya layanan secara terbuka, dan melakukan monitoring pelayanan secara berkala.	Camat / Sekretaris Kecamatan	Triwulan IV 2026
2	Laporan koordinasi menyebutkan kegiatan telah dilaksanakan, padahal rapat hanya dilakukan secara informal tanpa undangan resmi, daftar hadir, dan dokumentasi.	RSO.24.99.40.02	Setiap kegiatan rapat koordinasi diwajibkan membuat notulen dan daftar hadir.	Sebagian rapat koordinasi belum dilengkapi undangan resmi, daftar hadir dan dokumentasi.	Mewajibkan setiap kegiatan rapat dilengkapi undangan, daftar hadir, notulen, serta dokumentasi kegiatan.	Sekretaris Kecamatan	Triwulan II 2026
3	Usulan Anggaran yang Tidak sesuai denganKebutuhan Anggaran	RSO.24.99.40.04	Penyusunan anggaran dilakukan melalui usulan masing-masing seksi dan diverifikasi oleh tim perencanaan.	Perencanaan kebutuhan anggaran belum sepenuhnya berbasis data kebutuhan riil.	Melakukan evaluasi kebutuhan anggaran berdasarkan capaian kegiatan sebelumnya dan meningkatkan koordinasi antar seksi dalam penyusunan anggaran.	Sekretaris Kecamatan / Kasubbag Perencanaan	Triwulan IV 2026
4	Dalam laporan pertanggungjawaban, tercantum pengeluaran perjalanan dinas penuh, namun sebagian kegiatan tidak dilaksanakan sesuai rencana dan bukti pendukung tidak lengkap.	RSO.24.99.40.04	Perjalanan dinas harus mendapatkan persetujuan pimpinan dan membuat laporan perjalanan dinas.	Bukti kegiatan perjalanan dinas belum seluruhnya lengkap.	Melakukan verifikasi laporan perjalanan dinas dan mewajibkan dokumentasi kegiatan sebelum proses pembayaran.	Sekretaris Kecamatan	Triwulan IV/2026
5	Dalam laporan pertanggungjawaban, tercantum pengeluaran perjalanan dinas penuh, namun sebagian kegiatan tidak dilaksanakan sesuai rencana dan	RSO.24.99.40.05	Telah terdapat ketentuan pembuatan laporan perjalanan dinas.	Dokumentasi dan bukti kegiatan belum selalu dilampirkan.	Mewajibkan lampiran bukti kegiatan dan dokumentasi dalam laporan perjalanan dinas.	Sekretaris Kecamatan	Triwulan IV 2026

	bukti pendukung tidak lengkap.						
6	Terdapat data kehadiran atau riwayat jabatan pegawai yang tidak sesuai kondisi riil, namun tetap digunakan sebagai dasar pengajuan hak kepegawaian.	RSO.24.99.40.06	Pengisian daftar hadir pegawai setiap hari dan pengelolaan data kepegawaian oleh bagian kepegawaian.	Belum dilakukan verifikasi data kepegawaian secara berkala.	Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan IV 2026
Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:							
1	Terjadinya manipulasi data atau pungutan tidak resmi dalam pelayanan kepada masyarakat.	RSO.24.99.40.01	Informasi pelayanan dan biaya layanan telah disampaikan kepada masyarakat.	Pengawasan pelayanan belum dilakukan secara rutin.	Melakukan pemantauan pelayanan secara berkala oleh pimpinan.	Camat	Triwulan IV 2026
2	Laporan koordinasi menyebutkan kegiatan telah dilaksanakan, padahal rapat hanya dilakukan secara informal tanpa undangan resmi, daftar hadir, dan dokumentasi.	RSO.24.99.40.02	Kegiatan koordinasi telah dilakukan oleh perangkat kecamatan.	Dokumentasi kegiatan belum lengkap.	Melengkapi dokumen rapat seperti undangan, daftar hadir dan dokumentasi.	Sekretaris Kecamatan	Triwulan IV 2026
3	Ketidaksesuaian data jumlah keluarga peserta dengan kondisi riil di lapangan.	RSO.24.99.40.03	Pendataan dilakukan oleh desa dan kecamatan.	Validasi data belum dilakukan secara berkala.	Melakukan pengecekan dan pembaruan data secara berkala.	Kasi Pemerintahan	Triwulan IV 2026
4	Ketidaksesuaian data laporan konflik yang ditangani dengan kondisi riil di lapangan.	RSO.24.99.40.04	Pencatatan laporan konflik dilakukan oleh petugas kecamatan.	Dokumentasi penanganan konflik belum lengkap.	Melengkapi laporan penanganan konflik dan dokumentasi kegiatan.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Triwulan IV 2026
5	Pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tidak sesuai dengan pelaksanaan riil.	RSO.24.99.40.05	Laporan kegiatan disusun oleh masing-masing bagian.	Pemeriksaan laporan belum dilakukan secara menyeluruh.	Melakukan pemeriksaan laporan sebelum disampaikan.	Sekretaris Kecamatan	Triwulan IV 2026
6	Dalam laporan disebutkan bahwa seluruh desa telah dilakukan pembinaan dan diberikan rekomendasi perbaikan, namun sebagian desa tidak memiliki bukti rekomendasi tertulis maupun dokumentasi kegiatan.	RSO.24.99.40.06	Pembinaan kepada pemerintah desa telah dilakukan.	Tidak semua kegiatan memiliki dokumentasi dan rekomendasi tertulis.	Menyusun laporan pembinaan desa yang dilengkapi rekomendasi tertulis.	Kasi Pemerintahan	Triwulan IV 2026
7	Usulan Anggaran yang Tidak sesuai denganKebutuhan Anggaran	RSO.24.99.40.07	Penyusunan anggaran dilakukan melalui usulan kegiatan.	Analisis kebutuhan belum optimal.	Melakukan evaluasi kebutuhan sebelum penyusunan anggaran.	Sekretaris Kecamatan	Triwulan III 2026

8	Dalam laporan pertanggungjawaban, tercantum pengeluaran perjalanan dinas penuh, namun sebagian kegiatan tidak dilaksanakan sesuai rencana dan bukti pendukung tidak lengkap.	RSO.24.99.40.08	Perjalanan dinas dilaporkan kepada pimpinan.	Bukti kegiatan belum lengkap.	Melakukan pemeriksaan laporan perjalanan dinas sebelum pembayaran.	Sekretaris Kecamatan	Triwulan IV 2026
9	Terdapat data kehadiran atau riwayat jabatan pegawai yang tidak sesuai kondisi riil, namun tetap digunakan sebagai dasar pengajuan hak kepegawaian.	RSO.24.99.40.09	Pencatatan kehadiran pegawai dilakukan setiap hari.	Belum dilakukan pemeriksaan data secara berkala.	Melakukan pengecekan data kehadiran pegawai.	Kasubbag Umum	Triwulan IV 2026
10	Terdapat data kehadiran atau riwayat jabatan pegawai yang tidak sesuai kondisi riil, namun tetap digunakan sebagai dasar pengajuan hak kepegawaian.	RSO.24.99.40.010	Pengelolaan data pegawai dilakukan oleh bagian kepegawaian.	Belum dilakukan pembaruan data secara berkala.	Melakukan pembaruan data riwayat jabatan pegawai.	Kasubbag Umum	Triwulan IV 2026
11	Barang yang diterima secara fisik tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, namun tetap dibuatkan berita acara serah terima.	RSO.24.99.40.011	Barang yang diterima diperiksa sebelum dibuat berita acara serah terima.	Pemeriksaan barang belum selalu detail.	Melakukan pemeriksaan fisik barang secara lebih teliti sebelum serah terima.	PPK / Pengurus Barang	Triwulan IV 2026
12	Pembayaran jasa pemeliharaan dilakukan secara penuh meskipun pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai jadwal dan bukti pelaksanaan tidak lengkap.	RSO.24.99.40.012	Pembayaran dilakukan setelah laporan pekerjaan diterima.	Bukti pelaksanaan pekerjaan belum selalu lengkap.	Melakukan pengecekan pekerjaan sebelum proses pembayaran.	PPK / PPTK	Triwulan IV 2026
13	Dalam laporan dicantumkan 5 unit gedung telah direhabilitasi, namun setelah dilakukan pengecekan, terdapat 1 unit yang hanya dilakukan perbaikan ringan tanpa dokumentasi memadai.	RSO.24.99.40.013	Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dipantau oleh pelaksana kegiatan.	Dokumentasi pekerjaan belum lengkap.	Melakukan pengecekan hasil pekerjaan dan melengkapi dokumentasi.	PPTK	Triwulan IV 2026

E. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing resiko dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing resiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengendalian yang masih dibutuhkan Kantor Kecamatan Deket dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

N o	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:								
1	Melakukan sosialisasi pelayanan kepada petugas, memasang informasi biaya layanan secara terbuka, dan melakukan monitoring pelayanan secara berkala.	Rapat internal, papan informasi pelayanan, dokumentasi kegiatan	Camat / Sekretaris Kecamatan	Petugas pelayanan dan masyarakat	Triwulan IV 2026	-	-	-
2	Mewajibkan setiap kegiatan rapat dilengkapi undangan, daftar hadir, notulen, serta dokumentasi kegiatan.	Surat undangan rapat, notulen rapat, dokumentasi kegiatan	Sekretaris Kecamatan	Perangkat kecamatan	Triwulan II 2026	-	-	-
3	Melakukan evaluasi kebutuhan anggaran berdasarkan capaian kegiatan sebelumnya dan meningkatkan koordinasi antar seksi dalam penyusunan anggaran.	Rapat koordinasi, dokumen perencanaan anggaran	Kasubbag Perencanaan / Sekretaris Kecamatan	Camat dan seluruh seksi	Triwulan IV 2026	-	-	-
4	Melakukan verifikasi laporan perjalanan dinas dan mewajibkan dokumentasi kegiatan sebelum proses pembayaran.	Dokumen laporan perjalanan dinas dan bukti kegiatan	Sekretaris Kecamatan	Bagian keuangan	Triwulan IV/2026	-	-	-

5	Mewajibkan lampiran bukti kegiatan dan dokumentasi dalam laporan perjalanan dinas.	Dokumen laporan kegiatan dan dokumentasi perjalanan dinas	Sekretaris Kecamatan	Bagian keuangan	Triwulan IV 2026	-	-	-
6	Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala.	Data kepegawaian, arsip administrasi pegawai	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Camat / Sekretaris Kecamatan	Triwulan IV 2026	-	-	-
Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:								
1	Melakukan pemantauan pelayanan secara berkala oleh pimpinan.	Rapat evaluasi pelayanan dan dokumentasi monitoring	Camat	Petugas pelayanan	Triwulan IV 2026	-	-	-
2	Melengkapi dokumen rapat seperti undangan, daftar hadir dan dokumentasi.	Surat undangan, daftar hadir, notulen rapat	Sekretaris Kecamatan	Perangkat kecamatan	Triwulan IV 2026	-	-	-
3	Melakukan pengecekan dan pembaruan data secara berkala.	Dokumen pendataan dan laporan rekap data	Kasi Pemerintahan	Camat / Sekretaris Kecamatan	Triwulan IV 2026	-	-	-
4	Melengkapi laporan penanganan konflik dan dokumentasi kegiatan.	Laporan penanganan konflik dan dokumentasi kegiatan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Camat	Triwulan IV 2026	-	-	-
5	Melakukan pemeriksaan laporan sebelum disampaikan.	Dokumen laporan kegiatan	Sekretaris Kecamatan	Camat	Triwulan III 2026	-	-	-
6	Menyusun laporan pembinaan desa yang dilengkapi rekomendasi tertulis.	Laporan pembinaan desa dan rekomendasi tertulis	Kasi Pemerintahan	Camat dan pemerintah desa	Triwulan IV 2026	-	-	-
7	Melakukan evaluasi kebutuhan sebelum penyusunan anggaran.	Rapat evaluasi dan dokumen perencanaan anggaran	Sekretaris Kecamatan	Camat dan seluruh seksi	Triwulan IV 2026	-	-	-
8	Melakukan pemeriksaan laporan perjalanan dinas sebelum pembayaran.	Laporan perjalanan dinas dan bukti kegiatan	Sekretaris Kecamatan	Bagian keuangan	Triwulan IV 2026	-	-	-
9	Melakukan pengecekan data kehadiran pegawai.	Data kehadiran pegawai	Kasubbag Umum	Camat / Sekretaris Kecamatan	Triwulan IV 2026	-	-	-
10	Melakukan pembaruan data riwayat	Dokumen data kepegawaian	Kasubbag Umum	Camat / Sekretaris Kecamatan	Triwulan IV 2026	-	-	-

	jabatan pegawai.							
11	Melakukan pemeriksaan fisik barang secara lebih teliti sebelum serah terima.	Berita acara pemeriksaan barang	PPK / Pengurus Barang	Camat	Triwulan III 2026	-	-	-
12	Melakukan pengecekan pekerjaan sebelum proses pembayaran.	Laporan hasil pekerjaan dan dokumentasi kegiatan	PPK / PPTK	Bagian keuangan	Triwulan IV 2026	-	-	-
13	Melakukan pengecekan hasil pekerjaan dan melengkapi dokumentasi.	Dokumentasi kegiatan dan laporan hasil pekerjaan	PPTK	Camat	Triwulan III 2026	-	-	-

BAB IV
RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pada bab ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak terlibat dalam pengendalian resiko serta keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:							
1	Melakukan sosialisasi pelayanan kepada petugas, memasang informasi biaya layanan secara terbuka, dan melakukan monitoring pelayanan secara berkala.	Monitoring langsung oleh pimpinan, evaluasi pelayanan melalui rapat staf, pengecekan papan informasi biaya layanan	Sekretaris Kecamatan / Kasi Pelayanan	Dilaksanakan secara berkala setiap triwulan Dilaksanakan secara berkala setiap triwulan	-	-	-
2	Mewajibkan setiap kegiatan rapat dilengkapi undangan, daftar hadir, notulen, serta dokumentasi kegiatan.	Pemeriksaan kelengkapan dokumen rapat	Sekretaris Kecamatan	Setiap pelaksanaan rapat	-	-	-
3	Melakukan evaluasi kebutuhan anggaran berdasarkan capaian kegiatan sebelumnya dan meningkatkan koordinasi antar seksi dalam penyusunan anggaran.	Review dokumen perencanaan dan rapat koordinasi	Sekretaris Kecamatan / Kasi Perencanaan	Saat penyusunan RKA	-	-	-

4	Melakukan verifikasi laporan perjalanan dinas dan mewajibkan dokumentasi kegiatan sebelum proses pembayaran.	Pemeriksaan dokumen laporan perjalanan dinas	Sekretaris Kecamatan / Bendahara	Setiap pengajuan pembayaran	-	-	-
5	Mewajibkan lampiran bukti kegiatan dan dokumentasi dalam laporan perjalanan dinas.	Verifikasi bukti kegiatan dan dokumentasi	Sekretaris Kecamatan	Setiap laporan perjalanan dinas	-	-	-
6	Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala.	Pemeriksaan dan pembaruan data kepegawaian	Sekretaris Kecamatan / Pengelola Kepegawaian	Secara berkala	-	-	-

Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:

1	Melakukan pemantauan pelayanan secara berkala oleh pimpinan.	Monitoring langsung pelayanan	Camat / Sekretaris Kecamatan	Januari-Desember	-	-	-
2	Melengkapi dokumen rapat seperti undangan, daftar hadir dan dokumentasi.	Pemeriksaan dokumen rapat	Sekretaris Kecamatan	Januari-Desember	-	-	-
3	Melakukan pengecekan dan pembaruan data secara berkala.	Verifikasi dan pembaruan data	Sekretaris Kecamatan / Pengelola data	Januari-Desember	-	-	-
4	Melengkapi laporan penanganan konflik dan dokumentasi kegiatan.	Pemeriksaan laporan dan dokumentasi	Kasi Pemerintahan	Januari-Desember	-	-	-

5	Melakukan pemeriksaan laporan sebelum disampaikan.	Review laporan kegiatan	Sekretaris Kecamatan	Januari-Desember	-	-	-
6	Menyusun laporan pembinaan desa yang dilengkapi rekomendasi tertulis.	Evaluasi laporan pembinaan desa	Kasi Pemerintahan	Januari-Desember	-	-	-
7	Melakukan evaluasi kebutuhan sebelum penyusunan anggaran.	Rapat evaluasi kebutuhan anggaran	Sekretaris Kecamatan	Januari-Desember	-	-	-
8	Melakukan pemeriksaan laporan perjalanan dinas sebelum pembayaran.	Verifikasi laporan perjalanan dinas	Sekretaris Kecamatan / Bendahara	Januari-Desember	-	-	-
9	Melakukan pengecekan data kehadiran pegawai.	Pemeriksaan absensi pegawai	Pengelola Kepegawaian	Januari-Desember	-	-	-
10	Melakukan pembaruan data riwayat jabatan pegawai.	Verifikasi dan pembaruan data jabatan	Pengelola Kepegawaian	Januari-Desember	-	-	-
11	Melakukan pemeriksaan fisik barang secara lebih teliti sebelum serah terima.	Pemeriksaan fisik barang	Pengurus Barang	Januari-Desember	-	-	-
12	Melakukan pengecekan pekerjaan sebelum proses pembayaran.	Verifikasi hasil pekerjaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Januari-Desember	-	-	-
13	Melakukan pengecekan hasil pekerjaan dan melengkapi dokumentasi.	Pemeriksaan hasil pekerjaan dan dokumentasi	PPTK / Pengawas kegiatan	Januari-Desember	-	-	-

BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa resiko dapat di pantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan dan berjalan efektif sebagaimana tabel di bawah ini :

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:										
1	Terjadinya manipulasi data atau pungutan tidak resmi dalam pelayanan kepada masyarakat.	RSO.24.99.40.01					Melakukan sosialisasi pelayanan kepada petugas, memasang informasi biaya layanan secara terbuka, dan melakukan monitoring pelayanan secara berkala.	Dilaksanakan secara berkala setiap triwulan Dilaksanakan secara berkala setiap triwulan	-	-
2	Laporan koordinasi menyebutkan kegiatan telah dilaksanakan, padahal rapat hanya dilakukan secara informal tanpa undangan resmi, daftar hadir, dan dokumentasi.	RSO.24.99.40.02					Mewajibkan setiap kegiatan rapat dilengkapi undangan, daftar hadir, notulen, serta dokumentasi kegiatan.	Setiap pelaksanaan rapat	-	-
3	Usulan Anggaran yang Tidak sesuai denganKebutuhan Anggaran	RSO.24.99.40.04					Melakukan evaluasi kebutuhan anggaran berdasarkan capaian kegiatan sebelumnya dan meningkatkan koordinasi antar seksi dalam penyusunan anggaran.	Saat penyusunan RKA	-	-

4	Dalam laporan pertanggungjawaban, tercantum pengeluaran perjalanan dinas penuh, namun sebagian kegiatan tidak dilaksanakan sesuai rencana dan bukti pendukung tidak lengkap.	RSO.24.99.40.04					Melakukan verifikasi laporan perjalanan dinas dan mewajibkan dokumentasi kegiatan sebelum proses pembayaran.	Setiap pengajuan pembayaran	-	-
5	Dalam laporan pertanggungjawaban, tercantum pengeluaran perjalanan dinas penuh, namun sebagian kegiatan tidak dilaksanakan sesuai rencana dan bukti pendukung tidak lengkap.	RSO.24.99.40.05					Mewajibkan lampiran bukti kegiatan dan dokumentasi dalam laporan perjalanan dinas.	Setiap laporan perjalanan dinas	-	-
6	Terdapat data kehadiran atau riwayat jabatan pegawai yang tidak sesuai kondisi riil, namun tetap digunakan sebagai dasar pengajuan hak kepegawaian.	RSO.24.99.40.06					Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala.	Secara berkala	-	-

Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:

1	Terjadinya manipulasi data atau pungutan tidak resmi dalam pelayanan kepada masyarakat.	RSO.24.99.40.01					Melakukan pemantauan pelayanan secara berkala oleh pimpinan.	Januari-Desember	-	-
2	Laporan koordinasi menyebutkan kegiatan telah dilaksanakan, padahal rapat hanya dilakukan secara informal tanpa undangan resmi, daftar hadir, dan dokumentasi.	RSO.24.99.40.02					Melengkapi dokumen rapat seperti undangan, daftar hadir dan dokumentasi.	Januari-Desember	-	-
3	Ketidaksesuaian data jumlah keluarga peserta dengan kondisi riil di lapangan.	RSO.24.99.40.03					Melakukan pengecekan dan pembaruan data secara berkala.	Januari-Desember	-	-
4	Ketidaksesuaian data laporan konflik yang ditangani dengan kondisi riil di lapangan.	RSO.24.99.40.04					Melengkapi laporan penanganan konflik dan dokumentasi kegiatan.	Januari-Desember	-	-

5	Pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tidak sesuai dengan pelaksanaan riil.	RSO.24.99.40.05					Melakukan pemeriksaan laporan sebelum disampaikan.	Januari-Desember	-	-
6	Dalam laporan disebutkan bahwa seluruh desa telah dilakukan pembinaan dan diberikan rekomendasi perbaikan, namun sebagian desa tidak memiliki bukti rekomendasi tertulis maupun dokumentasi kegiatan.	RSO.24.99.40.06					Menyusun laporan pembinaan desa yang dilengkapi rekomendasi tertulis.	Januari-Desember	-	-
7	Usulan Anggaran yang Tidak sesuai denganKebutuhan Anggaran	RSO.24.99.40.07					Melakukan evaluasi kebutuhan sebelum penyusunan anggaran.	Januari-Desember	-	-
8	Dalam laporan pertanggungjawaban, tercantum pengeluaran perjalanan dinas penuh, namun sebagian kegiatan tidak dilaksanakan sesuai rencana dan bukti pendukung tidak lengkap.	RSO.24.99.40.08					Melakukan pemeriksaan laporan perjalanan dinas sebelum pembayaran.	Januari-Desember	-	-
9	Terdapat data kehadiran atau riwayat jabatan pegawai yang tidak sesuai kondisi riil, namun tetap digunakan sebagai dasar pengajuan hak kepegawaian.	RSO.24.99.40.09					Melakukan pengecekan data kehadiran pegawai.	Januari-Desember	-	-
10	Terdapat data kehadiran atau riwayat jabatan pegawai yang tidak sesuai kondisi riil, namun tetap digunakan sebagai dasar pengajuan hak kepegawaian.	RSO.24.99.40.010					Melakukan pembaruan data riwayat jabatan pegawai.	Januari-Desember	-	-
11	Barang yang diterima secara fisik tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, namun tetap dibuatkan berita acara serah terima.	RSO.24.99.40.011					Melakukan pemeriksaan fisik barang secara lebih teliti sebelum serah terima.	Januari-Desember	-	-
12	Pembayaran jasa pemeliharaan dilakukan secara penuh meskipun pekerjaan tidak dilaksanakan	RSO.24.99.40.012					Melakukan pengecekan pekerjaan sebelum proses pembayaran.	Januari-Desember	-	-

	sesuai jadwal dan bukti pelaksanaan tidak lengkap.									
13	Dalam laporan dicantumkan 5 unit gedung telah direhabilitasi, namun setelah dilakukan pengecekan, terdapat 1 unit yang hanya dilakukan perbaikan ringan tanpa dokumentasi memadai.	RSO.24.99.40.013					Melakukan pengecekan hasil pekerjaan dan melengkapi dokumentasi.	Januari-Desember	-	-

BAB VI PENUTUP

Laporan penilaian resiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di Lingkungan Kantor Kecamatan Deket sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan telah melakukan analisis manajemen risiko dari setiap kegiatan yang ada per triwulan. Berdasarkan hasil analisa manajemen risiko dari kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Deket terdapat kemungkinan risiko hampir/pasti terjadi minimal sekali setiap satu tahun dengan penilaian risiko dari sisi tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko yaitu dampak rendah dan sedang dimana tidak berdampak langsung pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan. Adapun potensi risiko terkait dengan dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor kondisi keadaan masyarakat.

Laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan keterbatasan pengetahuan dan pesatnya perkembangan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi dan globalisasi memunculkan potensi-potensi risiko yang baru dari tahun ke tahun. Oleh karena itu penyusun menyadari masih banyak yang harus disempurnakan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk kemajuan Kecamatan Deket.



SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M
Pembina
NIP. 19851010 200602 1 001

